



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BATANG

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 189 sampai dengan pasal 193, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab II pasal 2 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa setiap Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.

SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang penanaman modal, adalah merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Neraca menyajikan asset, utang, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyajikan pendapatan LO dan beban, yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari laporan operasional (LO). Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Guna menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk petanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selama satu periode tahun anggaran 2023.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas ekonomi, sosial, maupun politik, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan tahun Anggaran 2023.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4575);



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;



- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- ã. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 Nomor);
- dd. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 19);
- ee. Peraturan Bupati Batang 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 73);
- ff. Peraturan Bupati Batang 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 76);
- gg. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 91);
- hh. Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 120);
- ii. Peraturan Bupati Batang Nomor 44 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 Nomor 44);

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan



2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
2. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Surplus / Defisit Kegiatan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - a. Ekuitas Awal
 - b. Surplus / Defisit LO
 - c. Koreksi Kesalahan Mendasar
 - d. Ekuitas Akhir

Bab IV Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan.

Bab V Penutup.



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang diklasifikasikan menjadi urusan wajib dan pilihan, dan di sajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

REALISASI PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

NO REK	URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	
				(Rp)	(%)
1	WAJIB	8.067.500.000,00	8.461.050.360,00	393.550.360	104,88
2	PILIHAN				
	JUMLAH				

REALISASI BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

NO REK	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	(%)
1	WAJIB	6.364.008.977,00	5.844.419.996,00	(519.588.981)	91,84
2	PILIHAN				
	JUMLAH				

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Belanja

Belanja tidak terserap (yang realisasinya dibawah 85%) disebabkan karena :

- 1) Belanja Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 84,01% dikarenakan ada sisa anggaran upah pungut yang tidak bisa diambil karena realisasi pendapatan tidak mencapai 100%.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan - LRA dan Belanja.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening umum kas daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih pada periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan – LRA menggunakan basis kas,

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: 1) pendapatan pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Realisasi PAD Tahun 2023 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah			
a) Pajak Daerah	-	-	-
b) Hasil Retribusi Daerah	8.067.500.000,00	8.461.050.360,00	4.500.838.495,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
d) Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
	8.067.500.000,00	8.461.050.360,00	4.500.838.495,00

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi PAD Tahun 2023 lebih besar Rp (8.461.050.360),- atau Pendapatan sudah melebihi target sebesar 104,88%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, realisasi PAD Tahun 2022 lebih kecil Rp 4.500.838.495,-.

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang tahun anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Hasil Retribusi Daerah:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.400.000.000,00	8.458.070.360,00	4.484.458.495,00
Retribusi Izin Trayek	17.500.000,00	7.500.000,00	16.380.000,00
Retribusi IMTA	-	-	-
	7.417.500.000,00	8.465.570.360,00	4.500.838.495,00
Jumlah Hasil Retribusi	7.417.500.000,00	8.465.570.360,00	4.500.838.495,00

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bila dibandingkan dengan anggarannya, realisasi hasil retribusi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang Tahun 2023 lebih kecil Rp (1.048.070.360,-) atau (14,13)%.

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain- lain Pendapatan Asli daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Lain-lain PAD yang Sah	2022		2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan denda retribusi	-	-	5.711.252

2) Belanja

Belanja 3.008.220.131,- atau meningkat 2,02% adalah semua Pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih (Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	5.794.845.597,00	5.282.709.996,00	(217.562.946,00)	96,19
2	BELANJA MODAL	569.163.380,00	561.710.000,00	(729.100,00)	99,12
	JUMLAH	6.364.008.977,00	5.844.419.996,00	(218.292.046,00)	96,23

Berdasarkan rincian di atas dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja tahun 2023 lebih rendah Rp 217.562.946,- atau 96,19%.

NO	URAIAN	2023		2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.712.028.715,00	5.282.709.996,00	5.494.465.769,00	-0,04
2	Belanja Modal	83.086.600,00	561.710.000,00	82.357.500,00	5,82
	JUMLAH	5.795.115.315,00	5.844.419.996,00	5.576.823.269,00	0,05



Berikut penjelasan untuk masing-masing kelompok belanja:

a) **BELANJA OPERASI**

Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	5.712.028.715,00	5.282.709.996,00	2.799.838.709,00
Belanja Barang dan Jasa	83.086.600,00	561.710.000,00	2.694.627.060,00
	<u>5.795.115.315,00</u>	<u>5.844.419.996,00</u>	<u>5.494.465.769,00</u>

Dibandingkan dengan anggarannya, realisasi belanja operasi Tahun 2022 lebih rendah Rp 217.562.946,- atau 96,19%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi belanja operasi Tahun 2022 lebih besar Rp 693.399.366,- atau 14,44%.

Berikut penjelasan masing-masing jenis operasi tahun 2023 dan 2022 :

(1) **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	1.564.873.121,00	1.547.053.291,00	98,86	(17.819.830,00)	(1,14)
Tambahan Penghasilan ASN	1.045.604.574,00	1.004.257.872,00	96,05	(41.346.702,00)	(3,95)
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN	318.160.000,00	248.527.546,00	78,11	(69.632.454,00)	(21,89)
Jumlah	<u>2.928.637.695,00</u>	<u>2.799.838.709,00</u>	<u>95,60</u>	<u>(128.798.986,00)</u>	<u>(4,40)</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa rincian obyek insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur direklas ke belanja jasa.

(2) **Belanja Barang dan Jasa**

Anggaran dan realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Belanja Barang dan Jasa	2023			Lebih/kurang	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Barang	935.944.590,00	897.978.040,00	95,94	(37.966.550,00)	(4,23)
Belanja jasa	1.404.577.080,00	1.360.393.320,00	96,85	(44.183.760,00)	(3,25)
Belanja Pemeliharaan	121.766.000,00	117.461.200,00	96,46	(4.304.800,00)	(3,66)
Belanja Perjalanan Dinas	321.103.350,00	318.794.500,00	99,28	(2.308.850,00)	(0,72)
Jumlah	2.783.391.020,00	2.694.627.060,00	96,81	(88.763.960,00)	(3,29)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang sesuai bagan akun standar (BAS) rincian obyek bahan habis pakai, bahan material, cetak dan penggandaan, makan dan minum, pakaian dinas, belanja barang dana BOS direklas ke akun belanja barang. Rincian objek jasa kantor, premi asuransi, sewa, jasa belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek, jasa konsultasi dan belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pembicara/praktisi/pakar direklas ke akun belanja jasa. Rincian perawatan kendaraan bermotor dan pemeliharaan direklas ke akun pemeliharaan. Sedangkan rincian objek perjalanan dinas direklas ke akun belanja perjalanan dinas.

b) BELANJA MODAL

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang terdiri atas:

Belanja Modal:	Tahun 2022		Tahun 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	257.302.180,00	251.330.000,00	24.632.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	188.050.000,00
	257.302.180,00	251.330.000,00	212.682.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin :	2022			2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		%
Belanja Modal pengadaan alat-alat kantor rumah tangga	56.386.600	56.307.500	99,86	24.632.000	43,75
Belanja Modal pengadaan alat-alat studio, komunikasi dan pemancar	3.500.000	3.500.000	100,00	-	-
Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan	2.000.000	1.375.000	68,75	-	-
Belanja Modal alat komputer	21.200.000	21.175.000	99,88	-	-
	83.086.600	82.357.500	99,12	24.632.000	29,91
Jumlah Belanja Modal	83.086.600	82.357.500	99,12	24.632.000	30



2. NERACA

Neraca terdiri atas asset, kewajiban dan ekuitas. Uraian selengkapnya akun-akun dalam neraca adalah sebagai berikut :

a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Batang yang ada di DPMPTSP terbagi dalam:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1) Aset Lancar	1.221.700,00	1.244.300,00
2) Investasi Jangka Panjang	-	-
3) Aset Tetap	6.705.020.352,48	6.704.080.974,00
4) Aset Lainnya	16.875.000,00	43.178.722,00
	6.723.117.052,48	6.748.503.996,00

Berdasarkan rincian Aset dalam tabel terlihat bahwa terjadi penurunan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu sebesar Rp 25.386.943,52,- atau 0,38%.

1) ASET LANCAR

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
a) Kas di Kasda	-	-
b) Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
c) Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
d) Kas di BLUD	-	-
e) Kas Lainnya	-	-
f) Investasi jangka pendek	-	-
g) Piutang Pajak Daerah	-	-
h) Piutang Retribusi	-	-
i) Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-
j) Belanja Dibayar Dimuka	-	-
k) Piutang Transfer	-	-
l) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
m) Piutang Lainnya	-	-
n) Persediaan	1.221.700,00	1.244.300,00
	1.221.700,00	1.244.300,00



a) **Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(1) Persediaan ATK/Pakai Habis	1.221.700,00	1.244.300,00
(2) Persediaan Obat-obatan medis	-	-
(3) Persediaan Obat-obatan ternak	-	-
(4) Persediaan Rumah tangga	-	-
(5) Persediaan Benda Berharga	-	-
(6) Persediaan Lainnya	-	-
	<u>1.221.700,00</u>	<u>1.244.300,00</u>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD. Nilai persediaan lainnya tersebut termasuk nilai persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum diserahkan kepada masyarakat karena penerima hibah barang belum berbadan hukum.

Berikut penjelasan dari masing-masing persediaan :

- (1) Persediaan alat tulis kantor
Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.221.700,- dengan perincian terlampir.
- (2) Persediaan obat-obatan medis
Persediaan obat-obatan medis per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- dengan perincian terlampir.
- (3) Persediaan obat-obatan ternak.
Persediaan obat-obatan ternak per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- dengan perincian terlampir.
- (4) Persediaan Rumah Tangga.
Persediaan rumah tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- dengan perincian terlampir.
- (5) Persediaan benda berharga.
Persediaan benda berharga per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- dengan perincian terlampir
- (6) Persediaan lainnya.
Persediaan lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- .



ASET TETAP

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Batang yang berada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang berupa aset tetap dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Penjelasan masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Penambahan aset tetap

(1) Penambahan aset tetap dari belanja modal

Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Realisasi Belanja Modal 2023 (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	82.357.500,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	82.357.500,00

(2) Penambahan Aset Bukan dari Belanja Modal terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Bukan Belanja Modal (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	11.750.000,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	11.750.000,00

Penambahan aset bukan dari belanja modal diantaranya karena adanya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang namun dalam penganggarnya masih terletak di akun belanja pegawai dan akun belanja barang dan jasa.

(3) Penambahan Aset dari Pindahan antar Rekening terinci pada kelompok aset tetap sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	Aset dari Pindahan antar Rekening (Rp)
Tanah	
Peralatan dan Mesin	137.443.000,00
Gedung dan Bangunan	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Aset tetap lainnya	
Konstruksi dalam pengerjaan	
	137.443.000,00

Rincian aset tetap tahun 2023



a) Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.461.121.517,- naik sebesar Rp. 237.530.000,- atau 5,32% dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin dalam neraca tahun 2022 sebesar Rp. 4.223.591.517,-

Berikut daftar rincian peralatan dan mesin berdasarkan 9 jenis peralatan dan mesin:

<i>Peralatan dan Mesin</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2023</i>	<i>Neraca Per 31 Des 2022</i>	<i>Naik (turun)</i>
Alat-alat besar	-	-	-
Alat -alat angkutan	1.009.567.928,00	1.009.567.928,00	-
alat-alat pertanian dan peternakan	2.656.500,00	2.656.500,00	-
alat-alat kantor dan rumah tangga	2.121.020.275,00	2.061.350.275,00	59.670.000,00
alat-alat studio dan komunikasi	182.260.152,00	180.380.152,00	1.880.000,00
alat-alat kedokteran dan	1.729.286,00	1.729.286,00	-
Komputer	1.125.334.376,00	949.354.376,00	175.980.000,00
Alat keselamatan kerja	18.553.000,00	18.553.000,00	-
Peralatan Olah Raga	-	-	-
Peralatan proses/ Produksi	-	-	-
Jumlah	4.461.121.517,00	4.223.591.517,00	237.530.000,00

Nilai peralatan dan mesin pada tahun 2023 berasal mutasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Mutasi penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. 263.080.000,- terdiri dari:

(a) Belanja Modal sebesar Rp 251.330.000,-

(b) Selain Belanja Modal sebesar Rp 11.750.000,- berasal dari:

	Mutasi tambah (Rp)
APBN	
APBD Provinsi	
Hibah	
Koreksi	
Reklasifikasi	11.750.000
Aset yang berasal dari barang dan jasa	-
	11.750.000

(2) Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.550.000,- dengan perincian sebagai berikut:



	<u>Mutasi Kurang (Rp)</u>
Hibah	
Penghapusan	
Koreksi	
Ubah kondisi	13.800.000
Extracountable	
Reklasifikasi	11.750.000
	<u>25.550.000</u>

b) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang disajikan di neraca DPMPSTSP Kab. Batang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.591.255.029,-.

Nilai gedung dan bangunan pada tahun 2023 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

- (1) Mutasi penambahan
Tidak terdapat mutasi penambahan aset gedung dan bangunan tahun 2023.
- (2) Mutasi pengurangan
Tidak terdapat mutasi pengurangan aset gedung dan bangunan tahun 2023.

c) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan di neraca daerah per 31 Desember 2023 sama dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 349.654.500,-.

Berikut daftar rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam neraca 2022:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	(Rp)	(Rp)
Jalan dan Jembatan	153.474.500	153.474.500
Bangunan Air		
Instalasi	151.265.000	151.265.000
Jaringan	44.915.000	44.915.000
	<u>349.654.500</u>	<u>349.654.500</u>

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

- (1) Mutasi penambahan
Tidak terdapat mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023
- (2) Mutasi Pengurangan
Tidak terdapat mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023

d) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di neraca DPMPSTSP Kab. Batang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-. Serta tidak terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan.



e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersaji di neraca DPMPTSP Kab. Batang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 198.540.700,- sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 198.540.700,- . Sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

2) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai akumulasi Penyusutan Aset tetap pada neraca 2023 dan neraca tahun 2022 sebagai berikut:

	Neraca Per 31 Des 2023 (Rp)	Neraca Per 31 Des 2022 (Rp)	Naik (turun) (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	(4.895.551.393,52)	(4.326.340.822,00)	(569.210.571,52)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.895.551.393,52)	(4.326.340.822,00)	(569.210.571,52)

3) ASET LAINNYA

Akun ini menggambarkan nilai tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, piutang retribusi, aset tak berwujud dan aset lain-lain dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

SKPD	Neraca Per 31 Des 2023(Rp)	Neraca Per 31 Des 2022 (Rp)	Naik (turun) (Rp)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
Aset tak Berwujud	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset lain-lain	-	13.178.722,00	(13.178.722,00)
	-	13.178.722,00	(13.178.722,00)

a) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud DPMPTSP Kab. Batang per 31 Desember 2023 senilai Rp. 30.000.000,- berupa aplikasi pelayanan perizinan online (SIPUAS).

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp. 13.125.000,-) pada tahun 2023 terinci sbb:

	Neraca per 31 Desember 2023 (Rp)	Neraca per 31 Desember 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	13.125.000,00	5.625.000,00	18.750.000,00
	13.125.000,00	5.625.000,00	18.750.000,00

a. KEWAJIBAN



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Akun kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Batang. Sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban DPMPTSP Kab. Batang terdiri dari :

Uraian	Neraca Per 31 Des 2023 (Rp)	Neraca Per 31 Des 2022 (Rp)	Naik (turun) (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	28.718.204,00	28.153.812,00	564.392,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	28.718.204,00	28.153.812,00	564.392,00

1) Kewajiban Jangka Pendek

Akun kewajiban Jangka Pendek merupakan akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Kewajiban jangka pendek DPMPTSP Kab. Batang Tahun 2023 terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Pendapatan di terima dimuka	-	-
Hutang Belanja	28.718.204,00	28.153.812,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	28.718.204,00	28.153.812,00

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

a) Hutang Belanja

Meliputi Utang listrik, telpon, internet dan air bulan Desember 2023 yang baru dibayar bulan Januari 2024 sebesar Rp. 28.153.812,-.

b. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban DPMPTSP Kab. Batang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas	6.694.398.848,48	6.720.350.184,00
	6.694.398.848,48	6.720.350.184,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak



perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada tahun 2023 Pendapatan-LO DPMPTSP Kab. Batang direalisasikan sebesar Rp. 8.461.050.360,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.753.793.095,- maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.707.257.265,- atau 77,99%.

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO pada tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagai berikut :

	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	%
1) Pendapatan Asli Daerah	8.461.050.360,00	4.753.793.095,00	3.707.257.265,00	77,99
2) Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	8.461.050.360,00	4.753.793.095,00	3.707.257.265,00	77,99

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa dari seluruh akun Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2021.

Penjelasan untuk masing-masing jenis pendapatan daerah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

 - a) pendapatan pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Berikut kami sampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah				
Hasil Retribusi Daerah	8.461.050.360,00	4.753.793.095,00	3.707.257.265,00	177,99
Pendapatan Asli Daerah lainnya	-	0,00	-	-
	8.461.050.360,00	4.753.793.095,00	3.707.257.265,00	177,99

Berdasarkan rincian Pendapatan Asli Daerah di atas terlihat bahwa hasil retribusi daerah memiliki capaian realisasi di atas realisasi tahun 2022, kecuali pendapatan asli daerah lainnya.

- a) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :

Hasil Retribusi Daerah:	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.458.070.360,00	4.484.458.495,00	3.973.611.865,00	(188,61)
Retribusi Izin Trayek	2.980.000,00	16.380.000,00	(13.400.000,00)	18,19
Retribusi IMTA	-	-	-	-
	8.461.050.360,00	4.500.838.495,00	3.960.211.865,00	187,99
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	8.461.050.360,00	4.500.838.495,00	3.960.211.865,00	(187,99)

Pada tahun 2023 pendapatan retribusi DPMPTSP Kab. Batang sebesar Rp. 8.461.050.360,- Mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.960.211.865,- atau 46,81% dari tahun 2022 sebesar Rp. 4.500.838.495,-.

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Penerimaan Kas (LRA) (Rp)	piutang 2023 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka 2023 (Rp)	Total (Rp)
	Retribusi Perizinan Tertentu						
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	8.458.070.360	-	-			8.458.070.360
	Retribusi Ijin Trayek	2.980.000	-	-			2.980.000
	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		-	-	-	-	-
	Jumlah	8.461.050.360	-	-	-	-	8.461.050.360

b. BEBAN-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya potensi manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain.

Selama tahun 2023, beban DPMPTSP Kab. Batang adalah sebesar Rp. 5.851.426.191,29 dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 5.982.538.303,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. (131.112.111,71),- atau 97,81%. Berikut realisasi beban 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 :



Pemerintah Kabupaten Batang
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Beban	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.670.336.323,00	2.740.618.545,00	(70.282.222,00)	97,44
Beban Persediaan	914.350.900,00	868.284.440,00	46.066.460,00	(105,31)
Beban Jasa	1.258.515.058,00	1.358.560.627,00	(100.045.569,00)	92,64
Beban Pemeliharaan	54.032.050,00	117.461.200,00	(63.429.150,00)	46,00
Beban Perjalanan Dinas	363.822.707,00	318.794.500,00	45.028.207,00	114,12
Beban Penyusutan dan	590.369.153,29	578.818.991,00	11.550.162,29	102,00
	5.851.426.191,29	5.982.538.303,00	(131.112.111,71)	97,81

1) **Beban Pegawai**

Beban pegawai adalah beban Pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk di dalamnya beban pegawai BLUD yang terdapat di BLUD RSUD Kabupaten Batang, BLUD RSUD Limpung dan BLUD Puskesmas se Kabupaten Batang dan beban pegawai BOS.

Beban pegawai di DPMPTSP Kab. Batang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.670.336.323,- Apabila dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.740.618.545,- mengalami penurunan sebesar Rp. 70.282.222,-.

Rincian beban pegawai tersebut terdiri dari :

Beban Pegawai	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun	%
Gaji dan tunjangan ASN	1.440.812.733,00	1.547.053.291,00	(106.240.558,00)	(6,87)
Tambahan Penghasilan	883.798.590,00	1.004.257.872,00	(120.459.282,00)	(11,99)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	322.700.000,00	248.527.546,00	74.172.454,00	29,84
Belanja gaji dan tunjangan KDHWKDH	23.025.000,00	-	-	-
Belanja pegawai BLUD	-	-	-	-
Jumlah	2.670.336.323,00	2.799.838.709,00	(152.527.386,00)	(5,45)

a) **Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

Beban persediaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 914.350.900,- sedangkan pada tahun 2022 beban persediaan adalah sebesar Rp 897.978.040,- sehingga bertambah sebesar Rp 16.372.860,- atau 1,79%.

Perbandingan rincian beban tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Beban Persediaan	Realisasi 2023(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/turun (Rp)
Belanja Barang	914.350.900,00	897.978.040,00	16.372.860,00
Jumlah	914.350.900,00	897.978.040,00	16.372.860,00

b) Beban Jasa

Beban jasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang.

Beban jasa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.258.515.058,- sedangkan pada tahun 2022 beban jasa adalah sebesar Rp 1.358.560.627,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 227.415.508,- atau turun 7,95%.

c) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah daerah yang bersifat tidak menambah nilai.

Beban pemeliharaan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 54.032.050,- sedangkan pada tahun 2022 beban pemeliharaan adalah sebesar Rp 117.461.200,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp (63.429.150),- atau turun 117,39%.

d) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten Batang yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 363.822.707,- sedangkan pada tahun 2022 beban perjalanan dinas adalah sebesar Rp 318.794.500,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 45.028.207,- atau naik 12,38%.

e) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 590.369.153,29 sedangkan pada tahun 2022 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 584.443.991,- sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 5.925.162,29 atau naik sebesar 1,003%.

c. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Dalam kegiatan operasional Tahun 2023, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 8.461.050.360,- dan realisasi beban Rp. 5.851.426.191,29,- maka DPMPSTP Kab. Batang mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 2.609.624.168,71,- Apabila



dibandingkan dengan surplus/defisit tahun 2022 sebesar Rp. 1.228.745.208,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.380.878.960,71,- atau naik sebesar 52,91%. Seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini :

<i>Uraian</i>	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan	8.461.050.360,00	4.753.793.095,00	3.707.257.265,00	177,99
Beban	5.851.426.191,29	5.982.538.303,00	(131.112.111,71)	97,81
Jumlah	2.609.624.168,71	(1.228.745.208,00)	3.838.369.376,71	(212,38)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Ekuitas Akhir.

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal DPMPTSP Kab. Batang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.701.546.462,00,- Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2022.

b. Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit-LO DPMPTSP Kab. Batang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.609.624.168,71,- yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi kesalahan mendasar tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas tahun 2023.

Koreksi-koreksi tersebut sebesar Rp. (2.616.771.782,23),- dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)
1) Surplus defisit LRA	(2.616.630.364,00)
2) Penyisihan piutang	
3) Koreksi Persediaan	
4) Penambahan aset tetap karena ubah kondisi	13.800.000,00
5) Pengurangan aset tetap karena ubah kondisi	(13.800.000,00)
6) Penambahan aset tetap dari pindahan antar rekening	11.750.000,00
10) Perhitungan akumulasi penyusutan AT yang kurang catat	(141.418,23)
11) Penambahan aset lainnya	
12) Pengurangan aset tetap karena pindahan antar rekening	(11.750.000,00)
13) Perhitungan akumulasi penyusutan AT ke Aset Lainnya	
14) Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	
	<u>(2.616.771.782,23)</u>



Berikut penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Penambahan aset tetap
Penambahan aset tetap sebesar Rp. 25.550.000,- terdiri dari :
 - a) Penambahan karena ubah kondisi Rp. 13.800.000,-
 - b) Penambahan dari pindahan antar rekening Rp. 11.750.000,-

- 2) Pengurangan Aset Tetap
Pengurangan aset tetap sebesar Rp. 137.443.000,- terdiri dari :

Pengurangan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)
Pengurangan karena penghapusan	
Pengurangan karena Mutasi ke SKPD Lain	
Pengurangan karena Hibah	
Pengurangan karena SK Koreksi	
Pengurangan karena rusak berat	
Pengurangan karena ubah kondisi	(13.800.000,00)
Pengurangan karena pindahan antar rekening	(11.750.000,00)
Pengurangan karena Lain-lain	
Jumlah	(25.550.000,00)

- 3) Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang kurang catat
Koreksi ekuitas yang disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset tetap yang
dobel catat sebesar Rp. (141.418,23),-

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 6.694.398.848,48,- dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp. 6.701.546.462,- maka mengalami penurunan sebesar Rp. 7.147.613,52,- atau turun sebesar 0,11%.



BAB V

PENUTUP

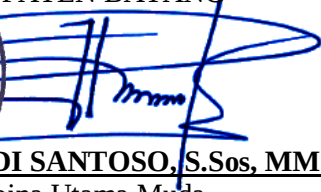
Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dimaksudkan untuk memberikan informasi secara mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang per 31 Desember 2022 serta kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2022. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Batang, 2 Januari 2024


KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BATANG

WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002